



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

JALAN TUNA RAYA NO.1 MUARA BARU UJUNG PENJARINGAN JAKARTA UTARA 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868
LAMAM <http://www.kkp.go.id/j> SUREL ppszi@kkp.go.id

Nomor : B.1745/PPSNZJ/KU.520/V/2024 13 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Keuangan Audited
Tahun 2023 tingkat UAKPA

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Lantai V
Jakarta Pusat - 10120

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-805/KPN.1206/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VI Periode 2023 Audited, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (537611) Periode 2023 Audited.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Asep Saepulloh
NIP. 196606041999031005



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE 31 DESEMBER 2023**

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
JL. TUNA RAYA NO. 1 MUARA BARU UJUNG
PENJARINGAN - JAKARTA UTARA
TELEPON : 021-6617868

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Asep Saepulloh

NIP. 196606041999031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan Penting Lainnya	67
VI. Lampiran dan Daftar	68

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
JL. TUNA RAYA NO. 1 MUARA BARU UJUNG
PENJARINGAN – JAKARTA UTARA
TELEPON 021 6617868, FAXIMILE 021 6617868

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Januari 2024

Ketua Pengguna Anggaran,



Asad Stepuhloh

NIP. 196606041999031005

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp40.698.237.377 atau mencapai 106,93 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp38.058.421.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp40.568.912.419 atau mencapai 99,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp40.701.662.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp192.838.027.074 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.474.529.766; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp143.948.980.207; Properti Investasi (neto) sebesar Rp11.577.447.253 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp18.837.069.848.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp334.046.827 dan Rp192.503.980.247.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp42.891.543.808, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp49.472.281.158 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.580.737.350). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp238.906.381 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6.341.830.969).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp199.657.276.749 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(6.341.830.969) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(219.840.575) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(591.624.958) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp192.503.980.247

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	38.058.421.000	40.698.237.377	106,94	37.518.144.528
JUMLAH PENDAPATAN		38.058.421.000	40.698.237.377	106,94	37.518.144.528
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.782.187.000	8.761.047.122	99,76	8.075.659.856
Belanja Barang	B.4	26.781.055.000	26.674.998.408	99,60	26.435.037.518
Belanja Modal	B.5	5.138.520.000	5.132.866.889	99,89	8.403.404.307
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		40.701.762.000	40.568.912.419	99,67	42.914.101.681

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	54.204.000	101.637.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	691.210.616	2.085.074.088
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(3.456.053)	(10.425.372)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	17.564.148.116	13.819.710.170
Persediaan	C.10	168.423.087	291.358.657
Jumlah Aset Lancar		18.474.529.766	16.287.354.543
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.784.632.000	1.784.632.000
Peralatan dan Mesin	C.15	94.020.688.495	90.406.809.939
Gedung dan Bangunan	C.16	79.455.642.228	93.543.756.023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	134.017.823.804	133.525.590.211
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(165.329.806.320)	(155.404.375.555)
Jumlah Aset Tetap		143.948.980.207	163.856.412.618
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	14.088.113.795	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(2.510.666.542)	-
Jumlah Properti Investasi		11.577.447.253	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	200.647.000	118.285.000
Aset Lain-Lain	C.24	46.470.729.627	46.152.134.627
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(27.834.306.779)	(26.419.783.421)
Jumlah Aset Lainnya		18.837.069.848	19.850.636.206
JUMLAH ASET		192.838.027.074	199.994.403.367
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	263.759.811	337.126.618
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	70.287.016	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		334.046.827	337.126.618
JUMLAH KEWAJIBAN		334.046.827	337.126.618
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	192.503.980.247	199.657.276.749
JUMLAH EKUITAS		192.503.980.247	199.657.276.749

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	42.891.543.808	37.227.852.823
JUMLAH PENDAPATAN		42.891.543.808	37.227.852.823
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.761.047.122	8.075.659.856
Beban Persediaan	D.3	654.991.564	665.926.794
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.021.366.621	17.366.176.763
Beban Pemeliharaan	D.5	4.264.381.192	5.806.060.824
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.083.626.481	2.671.908.235
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	13.686.469.483	14.505.450.828
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	398.695	3.810.273
JUMLAH BEBAN		49.472.281.158	49.094.993.573
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.580.737.350)	(11.867.140.750)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(1.372.223)	(2.497.256.580)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		240.278.604	(2.766.000)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		238.906.381	(2.500.022.580)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.341.830.969)	(14.367.163.330)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	199.657.276.749	207.613.801.165
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.068.895.068)	(14.367.163.330)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3	(219.840.575)	2.981.074.293
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(227.208.589)	2.973.104.743
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	7.368.014	7.969.550
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(591.624.958)	3.429.564.621
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	E.5	(6.880.360.601)	(7.956.524.416)
EKUITAS AKHIR	E.6	192.776.916.148	199.657.276.749

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan

Samudera Nizam Zachman Jakarta

Dasar Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Hukum didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
Entitas dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi
Rencana dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Strategis Perikanan nomor : 20/PERMEN-KP/2014, berkedudukan di Jalan Tuna
Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Penjaringan – Jakarta Utara.

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;

- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penertiban Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah melakukan revisi ke 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran, pembukaan blokir anggaran dan penambahan pagu PNPB. Perubahan tersebut membuat sebagian akun pagu menjadi bertambah dan ada yang berkurang dikarenakan blokir pagu. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	36.000.000	36.000.000
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	29.559.295.000	38.022.421.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	-
Jumlah Pendapatan	29.595.295.000	38.058.421.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.771.072.000	8.782.187.000
Belanja Barang	29.060.159.000	26.781.055.000
Belanja Modal	3.478.836.000	5.138.420.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	41.310.067.000	40.701.662.000

Realisasi
Pendapatan
Rp40.698.237.377

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.698.237.377 atau mencapai 106,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.058.421.000. Pendapatan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta terdiri dari Pendapatan Jasa, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	25.680.686	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	176.824.937	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	39.339.231	-
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	36.000.000	441.209.430	1.225,58
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	38.058.421.000	40.004.119.968	105,11
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	370.203	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	615.145	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	10.077.777	-
Jumlah	38.094.421.000	40.698.237.377	106,84

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2023 mengalami kenaikan 8,48% dibandingkan Semester II TA 2022. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2023 terdapat banyak pembayaran penyelesaian tindak lanjut BPK yang menambah realisasi PNBPN tahun 2023 dan terdapat beberapa kapal yang sudah beberapa tahun di kolam dan keluar pelabuhan di tahun 2023.

Pendapatan PNBPN terbesar yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar 40 Miliar Rupiah yang merupakan Akun PNBPN yang terdiri atas beberapa jasa seperti jasa pas masuk, jasa tambat labuh, jasa kebersihan kolam, jasa kebersihan Kawasan dan jasa listrik. Dalam akun tersebut terdapat pengembalian senilai Rp22.485.559 yang merupakan pengembalian atas kelebihan bayar jasa tambat labuh pada SPM Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak no. 00148A tanggal 03 Juni 2023 dan 00393A tanggal 26 September 2023.

Pendapatan denda lainnya merupakan pendapatan atas pengenaan denda terhadap keterlambatan pembayaran jasa Pelabuhan perikanan seperti tambat labuh, kebersihan kolam, kebersihan

Kawasan dan kantin, serta jasa listrik. Akan tetapi per bulan April 2023 semua denda dimasukkan ke dalam akun penerimaan terkait.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp370.203 merupakan potongan SPM atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah berupa Pemeliharaan Bolard Dermaga pada SPM nomor 00380A tanggal 16 Agustus 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.077.777	110.397.000	-90,87
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	441.209.430	142.108.300	210,47
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	40.004.119.968	37.221.814.051	7,47
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	370.203	13.682.278	-97,29
Pendapatan Denda Lainnya	615.145	6.142.240	-89,99
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	24.000.659	-100,00
Pendapatan Bunga lainnya	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	25.680.686	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	176.824.937	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	39.339.231	-	#DIV/0!
Jumlah	40.698.237.377	37.518.144.528	8,48

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp40.568.912.419

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp40.568.912.419 atau 99,67% dari anggaran belanja sebesar Rp40.701.662.000. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.763.592.772 atau 99,79% dari pagu anggaran sebesar Rp8.782.187.122, Belanja Barang sebesar Rp26.743.922.975 atau 99,86% dari pagu anggaran sebesar Rp26.781.055.000 dan Belanja Modal sebesar Rp5.132.866.889 atau 99,89% dari pagu anggaran Rp5.138.420.000. Total Realisasi Belanja Kotor sebesar Rp40.640.382.637 atau 99,85% adapun pengembalian belanja sebesar Rp71.470.218, jadi Total Realisasi Belanja bersih sebesar Rp40.568.912.419.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.782.187.000	8.763.592.772	99,79
Belanja Barang	26.781.055.000	26.743.922.976	99,86
Belanja Modal	5.138.420.000	5.132.866.889	99,89
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	40.701.662.000	40.640.382.637	99,85
Pengembalian		(71.470.218)	-
Jumlah	40.701.662.000	40.568.912.419	99,67

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.763.592.772	8.079.319.856	8,47
Belanja Barang	26.743.922.976	26.456.756.321	1,09
Belanja Modal	5.132.866.889	8.403.404.307	(38,92)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Kotor	40.640.382.637	42.939.480.484	(5,35)
Pengembalian Belanja	71.470.218	25.378.803	181,61
Jumlah Bersih	40.568.912.419	42.914.101.681	(5,46)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp8.763.592.772

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.763.592.772 dan Rp8.075.659.856. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK	4.538.884.372	4.120.840.706	10,14
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Khusus	4.102.559.500	3.886.132.150	5,57
Belanja Lembur	122.148.900	68.687.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	8.763.592.772	7.241.041.569	21,03
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.545.650)	(3.660.000)	
Jumlah Belanja	8.761.047.122	7.235.318.454	21,09

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp26.743.922.976

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.743.922.976 dan Rp26.456.756.321. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8.449.505.758	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	1.059.538.161	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	10.386.051.828	-	#DIV/0!
Belanja Persediaan	521.571.340	-	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan	4.210.963.387	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.116.292.502	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	26.743.922.976	26.435.037.518	1,17
Pengembalian Belanja	(68.924.568)	-	
Jumlah Belanja	26.674.998.408	26.435.037.518	0,91

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp5.132.866.889

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.132.866.889 dan Rp8.403.404.307. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 dibandingkan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 38,92% disebabkan karena adanya pagu belanja modal yang diblokir dan tidak bisa terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.745.187.296	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	305.317.593	0	-
Belanja Modal Lainnya	82.362.000	0	-
Jumlah Belanja Kotor	5.132.866.889	8.403.404.307	-
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	5.132.866.889	8.403.404.307	-38,92

Adapun rincian penambahan belanja modal adalah sebagai berikut :

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan maupun pengurangan tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp4.745.187.296, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.320.604.937. Hal ini disebabkan adanya blokir pagu belanja modal.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.063.455.400. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2022 karena terdapat pagu blokir pada belanja modal Gedung bangunan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp82.362.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 merupakan pembuatan aplikasi pemantauan kapal atau disebut sebagai Sikakap.

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial

Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada TA 2023 mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial untuk tahun 2022 tidak dialokasikan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Rekening Kas Negara setiap akhir tahun, sehingga tidak ada saldo pada kas di bendahara pengeluaran per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Kwitansi Belum di SPM GU kan	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp54.204.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp54.204.000 dan Rp101.637.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	54.204.000	101.637.000
Jumlah	54.204.000	101.637.000

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp691.210.616*

C. 4. Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp691.210.616 dan Rp2.085.074.088. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang tersebut merupakan piutang atas Jasa Pelabuhan Perikanan berupa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, serta piutang atas tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam)	645.490.616	1.729.177.671
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Kebersihan Pelabuhan dan Unit Pengolahan Limbah)	45.720.000	141.008.020
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (Jasa Listrik)	-	2.513.793
Penerimaan kembali Belanja TAYL	-	212.374.604
Jumlah	691.210.616	2.085.074.088

Saldo Piutang PNBP PPS Nizam Zachman Jakarta per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp691.210.616 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Piutang atas Jasa Tambat Labuh kapal perikanan pada kapal Arta Sampurna – II yang mencicil pembayaran sebanyak 6 kali dari November 2023 sampai dengan Juni 2024 dengan saldo piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp79.739.000 dan sudah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya di Tahun 2024.
- b. Piutang atas Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam senilai Rp1.729.177.671 pada Saldo 2022 telah ada progress dengan sisa nilai Rp1.181.875.775 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Senilai Rp1.197.947.636 yang merupakan piutang atas temuan pada LHA dari Tim Inspektorat Jenderal II KKP terkait Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Tambat Labuh Tahun 2019 s.d. 2020 dan telah dibayarkan senilai Rp694.270.010 sehingga sisa piutang menjadi Rp503.677.626,-.
 - 2) Piutang atas jasa tambat labuh yang diakibatkan oleh pembayaran yang dilakukan masih kurang dari yang seharusnya sesuai dengan perhitungan berdasarkan dokumen senilai Rp36.382.700 sudah dibayarkan seluruhnya sehingga sudah tidak ada sisa piutang.

- 3) Piutang atas jasa kebersihan Kawasan dan unit pengolahan limbah pada tahun 2021 dan jasa penggunaan listrik tahun 2022 yang masih belum dibayarkan senilai Rp86.689.393 terdapat koreksi senilai Rp40.320.000 atas jasa pengolahan limbah cair yang terdapat double catat karena sudah tercatat pada kelompok piutang di nomor 4 (rekomendasi LHP BPK RI 2021) dan terdapat progress senilai Rp2.513.793 atas jasa penggunaan listrik tahun 2022. Sehingga sisa piutang pada kelompok ini menjadi Rp45.720.000
- 4) Sebesar Rp549.679.755 merupakan Piutang yang terbentuk atas rekomendasi BPK RI pada LHP BPK RI tahun 2021 terkait potensi penerimaan Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam TA 2019 s.d. 2020 yang sudah berprogress di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdapat koreksi senilai Rp4.090.530,- karena ada billing pada aktivitas tersebut yang menjadi pengurang nilai dan didukung dengan dokumen aktivitas yang sesuai dengan pembayaran
 - b. Terdapat pembayaran senilai Rp487.605.765 atas tagihan piutang yang disampaikan pada tahun 2023 dan sisa piutang menjadi senilai Rp62.073.990
- c. Sebesar Rp212.374.604 merupakan piutang atas kelebihan belanja yang harus dikembalikan ke kas Negara sebagai pendapatan kembali atas belanja TAYL dan telah ditindaklanjuti semua kewajibannya pada tahun 2023 sehingga tidak ada lagi sisa piutang, rincian pembayaran piutang pada kelompok ini sebagai berikut :
 - 1) Senilai Rp11.194.307 merupakan kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Gedung Kantor Pelayanan Terpadu pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp11.194.307 dan sudah disetor dengan NTPN : EE45D8N3EA8DV793 tgl 9 Maret 2023

- 2) Senilai Rp24.355.360 merupakan kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Rumah Pompa dan Pengadaan pompa pengendali banjir barat beserta instalasinya pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp24.335.360 dan sudah disetor dengan NTPN : D841261QUQECB2HB tgl 9 Maret 2023
- 3) Senilai Rp12.050.904 merupakan kelebihan pembayaran akibat ketidaksesuaian pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pengadaan bahan cetakan karcis pas masuk harian dan stiker pas masuk berlangganan yang telah disetorkan dengan nomor NTPN : A869F61QUQK6F2JI tanggal 5 Mei 2023.
- 4) Senilai Rp53.417.805 merupakan kelebihan pembayaran yang dikarenakan terdapat tiga paket pekerjaan pemeliharaan di PPSNZJ yang tidak sesuai kontrak dan telah disetorkan di tahun 2023 dengan nomor NTPN : 8E2D16U8EL42UMDP tanggal 18 April 2023, lalu pada NTPN nomor : E568E0N9VR5TBP1U dan 8B7EB61QUQK7POG0 tanggal 5 Mei 2023.
- 5) Senilai Rp111.356.228 merupakan kelebihan pembayaran akibat Pertanggungjawaban belanja barang pada PPSNZJ tidak sesuai ketentuan dan telah disetorkan ke kas negara di tahun 2023 dengan nomor NTPN : 7D4E361QUQK7HTIA tanggal 3 Mei 2023.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1			
2			

Bagian Lancar

TPA

Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1			
2			
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp(3.456.053)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(3.456.053) dan Rp(10.425.372).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	691.210.616	0,5%	3.456.053
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	691.210.616		3.456.053
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	691.210.616		3.456.053

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2020	TH 2019
Jumlah	-	-

Pendapatan yang **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Masih Harus

Diterima

Rp17.564.148.116

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.564.148.116 dan Rp13.819.710.170. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA
2023 dan 2022*

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI	-	-
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	17.564.148.116	13.819.710.170
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah	17.564.148.116	13.819.710.170

PYMHD Tahun 2023 merupakan PYMHD atas Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam atas kapal-kapal yang masih berada di kolam Pelabuhan per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil pendataan kapal di kolam yang kemudian diperhitungkan potensi penerimaannya dari dokumen awal kedatangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan dan progress mengenai PYMHD serta PYMHD dari rekomendasi BPK dalam LHP BPK RI tahun 2022 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut :

- a. PYMHD atas Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Kapal Perikanan yang masih berada di kolam per 31 Desember 2023 sebanyak 711 Kapal dengan Nilai Tambat Labuh senilai Rp12.785.293.045 dan Kebersihan Kolam Senilai Rp1.192.527.263

b. PYMHD atas Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam pada LHP BPK RI no. 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang PPS Nizam Zachman Jakarta untuk melakukan rekonsiliasi PYMHD senilai Rp3.606.961.957,00 kepada pemilik kapal telah ditindaklanjuti oleh PPS Nizam Zachman Jakarta serta telah dilakukan reuiu oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil tindaklanjut rekonsiliasi dengan pemilik kapal dari 9 unit kapal yang tercatat sebagai PYMHD 2021, 8 unit masih berada dikolam dalam kondisi rusak berat dan tidak operasional dan 1 unit telah beraktifitas yaitu Kapal Hasil Laut 8 dengan total nilai PYMHD atas 9 kapal tersebut senilai Rp3.727.706.864.
2. Terhadap 5 Kapal yang terdapat selisih perhitungan pada penetapan PYMHD tahun 2021 senilai Rp371.481.810,00 telah ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi Bersama pemilik kapal sehingga nilai PYMHD menjadi senilai Rp21.464.217,00. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya klarifikasi dari pemilik kapal yang didukung dengan dokumen aktifitas kapal yang menyatakan ke lima kapal sudah tidak berada dalam kolam per 31 Desember 2021 dan seharusnya tidak masuk ke dalam PYMHD 2021. Terhadap senilai Rp21.464.217,00 telah dilakukan pembayaran atas nama kapal Samudera Deli dengan NTPN 805A548VV5LGRHRM.
3. Terhadap data awal 16 kapal yang berada di kolam pelabuhan per 31 desember 2021, berdasarkan dokumen aktifitas kapal dan/atau hasil klarifikasi dengan pemilik kapal dinyatakan 3 kapal tidak berada di kolam pelabuhan pada 31 Desember 2021, 10 kapal menyampaikan hasil klarifikasi lama waktu keberadaan kapal di kolam s.d. 31 Desember 2021 dan 3 kapal belum memberikan keterangan/klarifikasi. Terdapat

pembayaran atas nama Kapal Tri Wijaya Makmur senilai Rp23.342.250, sehingga PYMHD setelah dilakukan rekonsiliasi dengan pemilik kapal menjadi senilai Rp64,493,743.

Hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh PPS Nizam Zachman terhadap perhitungan PYMHD 31 Desember 2021 senilai Rp3.606.961.957 dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan pemilik/pengurus kapal dan data absensi kapal diketahui perhitungan PYMHD Per 31 Desember 2023 dapat diakui senilai Rp3.792.200.607 dan pendapatan yang telah diterima senilai Rp44.806.676.

c. Progres selama tahun 2023 atas LHP BPK RI Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 :

Terkait temuan yang terdapat dalam LHP BPK RI Tahun 2022 nomor: 10b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 27 Mei 2023 mengenai Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Pelabuhan Perikanan pada CaLK tahun 2022 senilai Rp22.754.943.665 sudah berprogres dengan membayar dan mengajukan klarifikasi pada saat rekonsiliasi dengan pemilik kapal dan hasil progres tersebut telah direviu oleh Tim Itjen II KKP melalui surat hasil reviu nomor : R.53/ITJ.2/HP.380/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 terhadap hasil rekonsiliasi antara PPS Nizam Zachman Jakarta dan Pemilik/Pengurus/Nakhoda kapal tersebut, bahwa kurang tagih Pendapatan JPP senilai Rp22.754.943.665,00 didapatkan hasil dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap PYMHD JPP non Tambat Labuh yang terdiri dari Jasa Kebersihan kolam Pelabuhan, Jasa Pengolahan Limbah Cair dan Jasa Kebersihan Kawasan Pelabuhan senilai Rp173.744.434 yang dirinci sebagai berikut :

- a. Dicatatkan pada Piutang Neraca pada LK audited TA 2022 senilai Rp141.814.994,69 (Rp57.346.212,77 atas Jasa UPL dan Kebersihan Kawasan dan Rp84.468.781,92 atas Jasa Kebersihan Kolam) yang kemudian progresnya dicatat dan diupdate pada bagian piutang;
 - b. Dicatatkan pada catatan atas Laporan Keuangan bagian PYMHD (non neraca face) senilai Rp22.250.111,08 yang merupakan tagihan terhadap 2 (dua) Perusahaan yang tidak bisa ditagihkan dikarenakan Perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan laporan yang diberikan PT. Perikanan Indonesia pada Maret 2023;
 - c. Senilai Rp9.679.328,00 telah tercatat dan terakumulasi pada Saldo PYMHD TA 2023 dan belum dapat ditagihkan dikarenakan nilai tersebut merupakan nilai potensi atas jasa kebersihan kolam Pelabuhan pada kapal yang masih berada di kolam PPSNZJ sampai saat ini.
2. Terhadap PYMHD JPP Tambat Labuh kapal non perikanan senilai Rp2.421.999.457,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kekurangan penagihan Pendapatan JPP berupa Jasa Tambat dan Labuh Non Perikanan senilai Rp1.968.190.500,00 untuk 2 (dua) transaksi atas 1 (satu) kapal, yaitu Kapal SPBB milik PT Perindo yang sudah dilayangkan surat pemberitahuan tagihan nomor B.5951/PPSNZJ/HP.510/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal pemberitahuan tagihan SPBB MT. Coastway. Namun sampai dengan saat ini belum ada respon konfirmasi yang menyatakan akan membayar atau mengklarifikasi dengan bukti dukung terhadap tagihan tersebut. Sesuai dengan hasil reuiu Itjen KKP, tagihan tersebut tidak dicatat di neraca namun dijelaskan pada

catatan atas laporan keuangan (CaLK) karena masih memerlukan konfirmasi dari PT. Perikanan Indonesia.

- b. Terdapat kekurangan bayar atas JPP Tambat dan Labuh Kapal Non Perikanan senilai Rp7.375.724,00 atas 6 kapal non perikanan yang dicatatkan di piutang neraca LK Audited TA 2022 dan progres dijelaskan pada bagian piutang.

3. Terhadap PYMHD JPP Tambat Labuh kapal perikanan senilai Rp2.399.594.790 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dicatat pada piutang neraca LK Audited TA 2022 senilai Rp484.957.817,86. Terhadap progres pembayarannya dijelaskan pada bagian piutang;
- b. Dicatat pada PYMHD senilai Rp1.192.083.882 karena kapal tersebut masih di kolam Pelabuhan sampai dengan akhir tahun 2022 dan nilai sudah terakumulasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang setelahnya menjadi bagian dari PYMHD kapal masih di kolam pada tahun 2022;
- c. Dicatat pada catatan LK (CaLK) bagian PYMHD (non neraca face) dikarenakan tagihan tersebut masih diperlukan klarifikasi oleh pemilik kapal senilai Rp722.553.091,00. Setelah dikonfirmasi dengan pemilik kapal, telah ditagihkan senilai Rp447.515.386,00 dikarenakan senilai Rp275.037.705,00 sudah diklarifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung yang valid sehingga tidak perlu ditagihkan kembali. Terhadap Rp447.515.386,00 yang ditagihkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara dengan Billing PNBPN.

Persediaan

Rp168.423.087

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp168.423.087 dan Rp291.358.657.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	168.423.087	291.358.657
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	168.423.087	291.358.657

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
	Jumlah	-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
	Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp1.784.632.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.784.632.000 dan Rp1.784.632.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.784.632.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Barang Berlebih	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	1.784.632.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	250 m2	Perumahan DPR Pulo Gebang Jl. Cengkeh D1/16 Jakarta Timur	1.784.632.000
Jumlah			1.784.632.000

Peralatan dan

Mesin

Rp94.020.688.495

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp94.020.688.495 dan Rp90.406.809.939. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	90.406.809.939
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	90.406.809.939
Pembelian	0
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Pengembangan Nilai Aset	90.406.809.939
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	94.020.688.495
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(79.091.142.636)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	14.929.545.859

Gedung dan

Bangunan

Rp79.455.642.228

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp79.455.642.228 dan Rp93.543.756.023. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	93.543.756.023
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN yg Tidak di Temukan	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah dihentikan	-
Saldo per 31 Desember 2023	79.455.642.228
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(12.345.188.935)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	67.110.453.293

Jalan, Jaringan

dan Irigasi

Rp134.017.823.804

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp134.017.823.804 dan Rp133.525.590.211. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	133.525.590.211
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN yang Tidak di Temukan	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	134.017.823.804
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(73.893.474.749)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	60.124.349.055

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap untuk Tahun 2023, terlampir sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
- Aset Tetap Renovasi	0
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. KDP pada tahun 2021 berupa pekerjaan perencanaan rehabilitasi gedung dan bangunan rumah pompa pengendali banjir darat telah diselesaikan di Tahun 2022 dan sudah tidak ada lagi KDP di tahun 2023.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(165.329.806.320)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(165.329.806.320) dan Rp(155.404.375.555). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	94.020.688.495	79.091.142.636	14.929.545.859
2	Gedung dan Bangunan	79.455.642.228	12.345.188.935	67.110.453.293
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.017.823.804	73.893.474.749	60.124.349.055
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		307.494.154.527	165.329.806.320	142.164.348.207

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Properti Investasi

Rp14.088.113.795

C.21 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp14.088.113.795 dan Rp0.

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Mutasi transaksi terhadap Properti Investasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	14.088.113.795
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	14.088.113.795
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(2.510.666.542)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	11.577.447.253

Aset Tak

Berwujud

Rp200.647.000

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp200.647.000 dan Rp118.285.000 .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

berupa *software (aplikasi)* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	118.285.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	82.362.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	200.647.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(99.973.375)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	100.673.625

Aset Lain-Lain

Rp46.470.729.627

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp46.470.729.627 dan Rp46.152.134.627. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	46.152.134.627
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	46.470.729.627
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(27.531.533.404)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	18.939.196.223

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(27.834.306.779)

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(27.834.306.779) dan Rp(26.419.783.421). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan

kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	46.470.729.627	27.531.533.404	18.939.196.223
Akumulasi Amortisasi Software	200.647.000	99.973.375	100.673.625
Jumlah	46.671.376.627	27.631.506.779	19.039.869.848

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp263.759.811

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp263.759.811 dan Rp337.126.618. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak ketiga senilai Rp263.759.811 merupakan pemakaian air dan Listrik serta retribusi sampah pada

Desember 2023 yang baru ditagihkan di Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya langganan Listrik bulan Desember 2023 senilai Rp140.181.236 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2024 dengan SPM LS
2. Biaya langganan air bulan Desember 2023 senilai Rp67.468.575 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2024 dengan SPM LS
3. Biaya retribusi sampah bulan Desember 2023 senilai Rp56.110.000 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2024 dengan kwitansi Bendahara.

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp70.287.016

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70.287.016 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Terdapat 11 Perusahaan yang berkontrak dengan PPS Nizam Zachman Jakarta untuk Penggunaan Bangunan Permanen di Kawasa Pelabuhan Perikanan dengan periode kontrak setahun atau lebih yang masa habis kontraknya melewati tahun 2023 dengan nilai pendapatan diterima di muka senilai Rp70.287.016.

Rincian Pendapatan diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Pendapatan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (Penggunaan Gedung Bangunan)	70.287.016
Total	70.287.016

*Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp0*

C.28 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan
TA 2022*

Uraian	TH 2023	TH 2022
Utang yang Belum Ditagihkan	1.192.863.832	0
Jumlah	1.192.863.832	0

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.412.899 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang yang masih belum diselesaikan pembayarannya di luar utang kepada pihak ketiga dan utang yang belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp188.984.715.541*

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp188.984.715.541 dan Rp199.657.276.749. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp42.891.543.808

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.891.543.808 dan Rp37.227.852.823. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gdg & bangunan	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Anggaran lain-lain	0	24.000.659	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	441.209.430	142.108.300	210,47
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	42.449.349.030	37.041.919.346	14,60
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendp Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	370.203	13.682.278	(97,29)
Pendapatan Denda Lainnya	615.145	6.142.240	(89,99)
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	0	0	#DIV/0!
Jumlah	42.891.543.808	37.227.852.823	15,21

Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 15% disebabkan karena terdapat kenaikan penerimaan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dan potensi penerimaan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam pada pymhd lebih besar dibanding potensi pada tahun 2022.

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar 38 Miliar Rupiah merupakan Akun PNBP yang terdiri atas beberapa jasa seperti jasa pas masuk, jasa tambat labuh, jasa kebersihan kolam, jasa kebersihan Kawasan, dan jasa pengolahan limbah cair.

Pendapatan denda lainnya merupakan pendapatan atas pengenaan denda terhadap keterlambatan pembayaran jasa Pelabuhan perikanan seperti tambat labuh, kebersihan kolam, kebersihan Kawasan dan kantin, serta jasa listrik.

Beban Pegawai
Rp8.761.047.122

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.761.047.122 dan Rp8.075.659.856. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	4.538.884.372	4.120.840.706	10,14
Beban Tunjangan-tunjangan	4.100.013.850	3.886.132.150	5,50
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	122.148.900	68.687.000	77,83
Jumlah	8.761.047.122	8.075.659.856	8,49

Beban Persediaan
Rp654.991.564

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp654.991.564 dan Rp665.926.794. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	654.991.564	665.926.794	-1,64
Beban Persediaan bahan baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	654.991.564	665.926.794	-1,64

*Beban Barang
dan Jasa
Rp20.021.366.621*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.021.366.621 dan Rp17.366.176.763. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN KEGIATAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	8.004.421.328	7.321.727.703	9,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	129.677.140	120.442.802	7,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	284.689.500	308.400.000	(7,69)
Beban Barang Operasional Lainnya	25.700.000	178.318.000	(85,59)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	127.488.000	(100,00)
Beban Bahan	1.145.334.389	2.017.164.098	(43,22)
Beban Honor Ouput Kegiatan	25.560.000	38.900.000	(34,29)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	52.915.000	-
Beban Langganan Listrik	2.425.956.981	2.291.671.163	5,86
Beban Langganan Telepon	447.000	156.610.652	(99,71)
Beban Langganan Air	451.917.618	252.009.750	79,33
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	461.082.050	390.150.654	18,18
Beban Jasa Konsultan	0	214.755.000	
Beban Sewa	84.247.017	328.185.270	(74,33)
Beban Jasa Profesi	25.200.000	18.000.000	40,00
Beban Jasa Lainnya	6.832.593.598	1.575.893.500	333,57
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	124.540.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	118.787.462	(100,00)
Jumlah	20.021.366.621	15.511.419.054	29,08

Pada Tahun 2022 masih terdapat akun khusus pos beban barang dan jasa terkait kondisi pandemi covid-19 yang terjadi namun di tahun 2023 sudah tidak ada dan sudah tidak dipakai karena kondisi covid-19 sudah mereda dan dinyatakan lepas dari pandemi.

Beban

Pemeliharaan

Rp4.264.381.192

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.264.381.192 dan Rp5.806.060.824. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.584.355.950	2.006.614.574	28,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.413.403.526	3.128.248.045	(54,82)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69.395.080	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Irigasi	50.762.836	401.190.301	(87,3)
Beban Pemeliharaan Jaringan	146.463.800	270.007.904	(45,76)
Beban Persediaan Suku Cadangan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	4.264.381.192	5.806.060.824	(26,55)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp2.083.626.481

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.083.626.481 dan Rp2.671.908.235. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	1.959.554.475	2.388.660.076
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.620.000	87.210.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.308.000	72.670.000
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.144.006	123.368.159
Beban Perjalanan Biasa - Luar negeri	0	0
Jumlah	2.083.626.481	2.671.908.235

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2022 tidak ada alokasi anggarannya. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp13.686.469.483**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.686.469.483 dan Rp14.505.450.828. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.480.235.626	4.465.450.629	0,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.027.434.749	2.236.560.566	(9,35)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5.947.501.792	6.825.796.757	(12,87)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Properti Investasi	194.061.458	-	-
Jumlah Penyusutan	12.649.233.625	13.527.807.952	(6,49)
Beban Amortisasi Software	29.366.500	19.071.250	53,98
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasional	1.007.869.358	958.571.626	5,14
Jumlah Amortisasi	1.037.235.858	977.642.876	6,10
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.686.469.483	14.505.450.828	(5,65)

**Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp398.695**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp398.695 dan Rp3.810.273. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	398.695	3.810.273	(89,54)
	0	0	-
Jumlah	398.695	3.810.273	-

*Defisit dari
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp(1.372.223)*

D.11 Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pelepasan Aset Non Lancar dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pelepasan atau penjualan aset non lancar milik Negara. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.077.777	110.397.000	(90,87)
Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar	- 11.450.000	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-1.372.223	110.397.000	(101,24)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp240.278.604*

D.12 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	25.680.686	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	176.824.937	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	39.339.231	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.100.900	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Rusak/Usang	-3.667.150	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	240.278.604	0	#DIV/0!

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak*

akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa

D.13 Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp199.657.276.749

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp199.657.276.749 dan Rp207.613.801.165.

Defisit LO

Rp(6.341.830.969)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(6.341.830.969) dan Rp(14.367.163.330). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan. Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp62.216.554.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp (17.157.436.450).

*Koreksi Nilai Aset
Tetap/Lainnya
Non Revaluasi
Rp(227.208.589)*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(227.208.589) dan Rp2.973.104.743. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	(227.208.589)
Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi	-
Jumlah	(227.208.589)

*Koreksi Lain-Lain
Rp7.368.014*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.368.014 dan Rp7.969.550. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang

Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	7.368.014
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	7.368.014

Transaksi Antar Entitas Rp(591.624.958)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(591.624.958) dan Rp3.429.564.621. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.568.912.419
Diterima dari Entitas Lain	(40.698.237.377)
Transfer Keluar	(462.300.000)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(591.624.958)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember

2023, DDEL sebesar Rp(40.698.237.377) sedangkan DKEL sebesar Rp40.568.912.419.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1			
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp(462.300.000) merupakan transfer keluar aset kendaraan ke PPS Belawan.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0. Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1		Uang	
2		Barang	
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp192.503.980.247

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp192.503.980.247 dan Rp199.657.276.749.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Pada Tahun 2023 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 12 kali terkait dengan penyesuaian penambahan belanja modal terhadap pengurangan belanja barang untuk Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Penangkapan Ikan Terukur.
- b. Sudah tidak terdapat akun belanja khusus covid karena di tahun 2023 sudah status pandemi secara resmi sudah dinyatakan dicabut oleh Presiden Republik Indonesia.
- c. Terhadap temuan Tim Inspektorat Jenderal II KKP terkait Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Pelabuhan Perikanan yang tercantum pada CaLK tahun 2021 dijelaskan pada penjelasan atas pos-pos neraca bagian Piutang PNB dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada CaLK Audited 2022 dan dijelaskan progresnya di tahun 2023 pada CaLK tahun 2023.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03
SATUAN KERJA : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN 537611

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	40,701,662,000	40,568,912,419	(132,749,581)	100	43,055,879,000	42,914,101,681	(141,777,319)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KLIASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (537611) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	54,204,000	101,637,000	(47,433,000)	(46.67)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	17,564,148,116	13,819,710,170	3,744,437,946	27.09
Piutang Bukan Pajak	691,210,616	2,085,074,088	(1,393,863,472)	(66.85)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(3,456,053)	(10,425,372)	6,969,319	(66.85)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	687,754,563	2,074,648,716	(1,386,894,153)	(66.85)
Persediaan	168,423,087	291,358,657	(122,935,570)	(42.19)
JUMLAH ASET LANCAR	18,474,529,766	16,287,354,543	2,187,175,223	13.43
ASET TETAP				
Tanah	1,784,632,000	1,784,632,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	94,020,688,495	90,406,809,939	3,613,878,556	4.00
Gedung dan Bangunan	79,455,642,228	93,543,756,023	(14,088,113,795)	(15.06)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	134,017,823,804	133,525,590,211	492,233,593	0.37
AKUMULASI PENYUSUTAN	(165,329,806,320)	(155,404,375,555)	(9,925,430,765)	6.39
JUMLAH ASET TETAP	143,948,980,207	163,856,412,618	(19,907,432,411)	(12.15)
Properti Investasi				
Properti Investasi	14,088,113,795	0	14,088,113,795	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2,510,666,542)	0	(2,510,666,542)	0.00
JUMLAH Properti Investasi	11,577,447,253	0	11,577,447,253	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	200,647,000	118,285,000	82,362,000	69.63
Aset Lain-lain	46,470,729,627	46,152,134,627	318,595,000	0.69
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(27,834,306,779)	(26,419,783,421)	(1,414,523,358)	5.35
JUMLAH ASET LAINNYA	18,837,069,848	19,850,636,206	(1,013,566,358)	(5.11)
JUMLAH ASET	192,838,027,074	199,994,403,367	(7,156,376,293)	(3.58)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	263,759,811	337,126,618	(73,366,807)	(21.76)
Pendapatan Diterima Dimuka	70,287,016	0	70,287,016	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	334,046,827	337,126,618	(3,079,791)	(0.91)
JUMLAH KEWAJIBAN	334,046,827	337,126,618	(3,079,791)	(0.91)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	192,503,980,247	199,657,276,749	(7,153,296,502)	(3.58)
JUMLAH EKUITAS	192,503,980,247	199,657,276,749	(7,153,296,502)	(3.58)
JUMLAH EKUITAS	192,503,980,247	199,657,276,749	(7,153,296,502)	(3.58)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (537611) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:28 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	192,838,027,074	199,994,403,367	(7,156,376,293)	(3.58)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
RUASA PENGGUNA ANGGARAN
ASEP SAEPULLOH
196606041999031005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (537611) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:27 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	42,891,543,808	37,227,852,823	5,663,690,985	15.214
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	42,891,543,808	37,227,852,823	5,663,690,985	15.214
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	42,891,543,808	37,227,852,823	5,663,690,985	15.214
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,761,047,122	8,075,659,856	685,387,266	8.487
Beban Persediaan	654,991,564	665,926,794	(10,935,230)	(1.642)
Beban Barang dan Jasa	20,021,366,621	17,366,176,763	2,655,189,858	15.289
Beban Pemeliharaan	4,264,381,192	5,806,060,824	(1,541,679,632)	(26.553)
Beban Perjalanan Dinas	2,083,626,481	2,671,908,235	(588,281,754)	(22.017)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (537611) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 9:27 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13,686,469,483	14,505,450,828	(818,981,345)	(5.646)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	398,695	3,810,273	(3,411,578)	(89.536)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	49,472,281,158	49,094,993,573	377,287,585	0.768
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,580,737,350)	(11,867,140,750)	5,286,403,400	(44.547)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,372,223)	(2,497,256,580)	2,495,884,357	(99.945)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10,077,777	110,397,000	(100,319,223)	(90.871)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,450,000	2,607,653,580	(2,596,203,580)	(99.561)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	240,278,604	(2,766,000)	243,044,604	(8,786.862)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	243,945,754	0	243,945,754	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,667,150	2,766,000	901,150	32.58
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	238,906,381	(2,500,022,580)	2,738,928,961	(109.556)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,341,830,969)	(14,367,163,330)	8,025,332,361	(55.859)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,341,830,969)	(14,367,163,330)	8,025,332,361	(55.859)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 13 Mei 2024
Peranggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ASEP SAEPULLOH
196608041999031005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (537611) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:28 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	199,657,276,749	207,613,801,165	(7,956,524,416)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,341,830,969)	(14,367,163,330)	8,025,332,361	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(219,840,575)	2,981,074,293	(3,200,914,868)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(227,208,589)	2,973,104,743	(3,200,313,332)	-
LAIN-LAIN	7,368,014	7,969,550	(601,536)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(591,624,958)	3,429,564,621	(4,021,189,579)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,153,296,502)	(7,956,524,416)	803,227,914	-
EKUITAS AKHIR	192,503,980,247	199,657,276,749	(7,153,296,502)	-

Keterangan :

FINAL

13 Mei 2024
 Bertanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGUNA ANGGARAN

ASEP SAEPULLOH
 196606041999031005